



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 81 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 96 TAHUN 2022 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS
BEBAN KERJA PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 656 Tahun 2023 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 96 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan, perlu ditinjau kembali dan diubah untuk kedua kalinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 96 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 94);

10. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 47);
11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 96 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 96), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 96 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 96 TAHUN 2022 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEKALONGAN.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 96 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 96), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 96 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 26), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 22 Desember 2023

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 22 Desember 2023

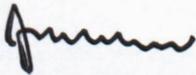
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

M. YULIAN AKBAR

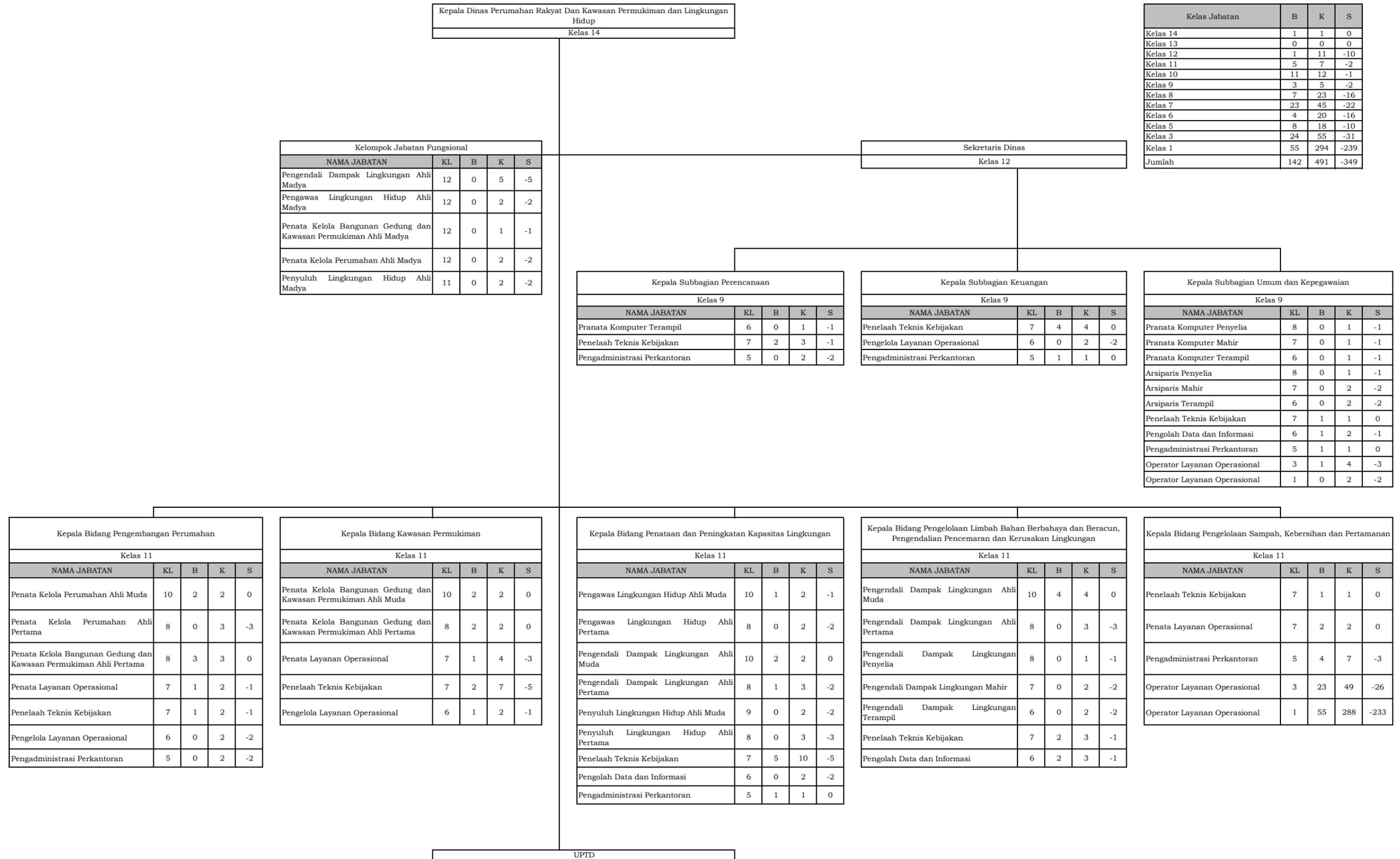
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBAANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



Kelas Jabatan	B	K	S
Kelas 14	1	1	0
Kelas 13	0	0	0
Kelas 12	1	11	-10
Kelas 11	5	7	-2
Kelas 10	11	12	-1
Kelas 9	3	5	-2
Kelas 8	7	23	-16
Kelas 7	23	45	-22
Kelas 6	4	20	-16
Kelas 5	8	18	-10
Kelas 3	24	55	-31
Kelas 1	55	294	-239
Jumlah	142	491	-349

Kelompok Jabatan Fungsional				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya	12	0	5	-5
Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya	12	0	2	-2
Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Madya	12	0	1	-1
Penata Kelola Perumahan Ahli Madya	12	0	2	-2
Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Madya	11	0	2	-2

Kelas 9				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Pranata Komputer Terampil	6	0	1	-1
Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	3	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	2	-2

Kelas 9				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Penelaah Teknis Kebijakan	7	4	4	0
Pengelola Layanan Operasional	6	0	2	-2
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	1	0

Kelas 9				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Pranata Komputer Penyelia	8	0	1	-1
Pranata Komputer Mahir	7	0	1	-1
Pranata Komputer Terampil	6	0	1	-1
Arsiparis Penyelia	8	0	1	-1
Arsiparis Mahir	7	0	2	-2
Arsiparis Terampil	6	0	2	-2
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1	0
Pengolah Data dan Informasi	6	1	2	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	1	0
Operator Layanan Operasional	3	1	4	-3
Operator Layanan Operasional	1	0	2	-2

Kelas 11				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Penata Kelola Perumahan Ahli Muda	10	2	2	0
Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	8	0	3	-3
Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	8	3	3	0
Penata Layanan Operasional	7	1	2	-1
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	2	-1
Pengelola Layanan Operasional	6	0	2	-2
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	2	-2

Kelas 11				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda	10	2	2	0
Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	8	2	2	0
Penata Layanan Operasional	7	1	4	-3
Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	7	-5
Pengelola Layanan Operasional	6	1	2	-1

Kelas 11				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	10	1	2	-1
Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	8	0	2	-2
Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	10	2	2	0
Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	8	1	3	-2
Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda	9	0	2	-2
Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama	8	0	3	-3
Penelaah Teknis Kebijakan	7	5	10	-5
Pengolah Data dan Informasi	6	0	2	-2
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	1	0

Kelas 11				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	10	4	4	0
Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	8	0	3	-3
Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia	8	0	1	-1
Pengendali Dampak Lingkungan Mahir	7	0	2	-2
Pengendali Dampak Lingkungan Terampil	6	0	2	-2
Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	3	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	2	3	-1

Kelas 11				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1	0
Penata Layanan Operasional	7	2	2	0
Pengadministrasi Perkantoran	5	4	7	-3
Operator Layanan Operasional	3	23	49	-26
Operator Layanan Operasional	1	55	288	-233

Keterangan :
 KL : Kelas Jabatan
 B : Jumlah Pegawai yang tersedia
 K : Kebutuhan Pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja
 S : Selisih

1. UPTD PENGELOLAAN SAMPAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kepala UPTD Pengelolaan Sampah				
Kelas 8				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Penata Layanan Operasional	7	1	1	0
Pengelola Layanan Operasional	6	0	1	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	1	-1
Operator Alat Berat	5	1	3	-2
Operator Layanan Operasional	3	0	2	-2
Operator Layanan Operasional	1	0	4	-4

Keterangan :

KL : Kelas Jabatan

B : Jumlah Pegawai yang tersedia

K : Kebutuhan Pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja

S : Selisih

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



ADITOMO HERLAMBAH, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009